



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## UPAYA PENGUATAN JARINGAN 4G DI DESA

**Lisbet**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[lisbet.sihombing@dpr.go.id](mailto:lisbet.sihombing@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo telah meminta kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, untuk melakukan percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan serta di titik-titik layanan publik. Dengan adanya percepatan akselerasi transformasi digital tersebut, maka dapat memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Tahun 2022, Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan bahwa Kemenkominfo telah berupaya untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia dari sektor hulu hingga hilir. Pembangunan infrastruktur digital ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 untuk mempercepat perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital, dan penyediaan layanan internet di Indonesia. Penyediaan ini dilakukan secara bertahap karena Indonesia merupakan *archipelago state*.

Hingga saat ini, Kemenkominfo sudah melakukan pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G di sekitar 9.113 titik lokasi wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Selain itu, untuk penyediaan akses internet di lapisan *last-mile*, hingga saat ini sudah dibangun sebanyak 4.161 BTS yang sudah *on air*, dan sisanya sedang terus dikerjakan agar dapat diselesaikan di masa akhir Kabinet pada tahun 2024.

Kendala yang dihadapi adalah, Kemenkominfo masih kekurangan 48 persen dari total kebutuhan anggarannya pada tahun 2023 atau sekitar Rp20,838 triliun. Pasalnya, pagu anggaran Kemenkominfo tahun anggaran 2023 sebesar Rp19,70 triliun, namun kebutuhan anggaran dipakai untuk pembiayaan beberapa program. Salah satunya adalah target pembangunan sebanyak 2.054 BTS baru di wilayah 3T dan pemeliharaan 7.012 BTS yang sudah ada. Saat ini, menurutnya anggaran sebesar Rp3,823 triliun baru cukup untuk menutup 332 BTS baru dan pemeliharaan 6.432 BTS yang sudah ada, sehingga dibutuhkan tambahan Rp6,52 triliun. Anggaran Kemenkominfo juga digunakan untuk pembangunan akses internet sebanyak 68.000 titik baru. Namun saat ini, dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp2,52 triliun, Kemenkominfo baru dapat membangun 9.755 titik baru akses internet.

Sementara itu, emiten telekomunikasi PT Indosat Tbk. (ISAT) juga memainkan perannya dalam rangka memperluas layanan jaringan internet di wilayah pedesaan. Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH) menargetkan 1.023 desa non-3T dapat terlayani jaringan internet pada 2022. Upaya ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong

pemanfaatan 4G sebagai tulang punggung jaringan digital nasional. Oleh karena itu, perseroan berkomitmen akan terus memperkuat infrastruktur jaringan dengan penambahan 11.400 lokasi baru dan perluasan jangkauan jaringan ke 7.660 desa anyar di seluruh Tanah Air, yang ditargetkan selesai pada akhir 2025.

## Atensi DPR

Dalam rangka mendukung program transformasi digital, Anggota Komisi I DPR Rizki Natakusumah pada saat Rapat Kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta komitmen Pemerintah agar seluruh desa di Indonesia mendapatkan sinyal 4G. Komitmen ini kembali diingatkan oleh Komisi I sesuai dengan janji Presiden Jokowi pada tahun 2021. Komisi I juga menganggap bahwa hal ini sangat penting karena masyarakat berhak untuk mendapatkan kualitas jaringan yang baik dalam hal komunikasi dan informasi.

Komisi I juga memberikan dukungan anggaran terhadap Kemenkominfo dengan menyetujui pagu alokasi anggarannya pada tahun 2023 sebesar Rp19.703.190.437.000,00. Dari total pagu tersebut, sebesar Rp13.981.017.281.000,00 digunakan untuk keperluan Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR perlu mengawal dan memastikan bahwa program transformasi digital yang dijalankan oleh Pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Begitu juga dengan penggunaan anggarannya harus akuntabel dan sesuai dengan peruntukan untuk mendukung program transformasi digital.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 23 September 2022;  
dpr.go.id, 25 dan 26 September 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Ari Muliarta G.  
Rafika Sari  
Ariesy Tri Mauleny

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022